

Edisi Indonesia • Indonesia Edition

# MEMBIAYAI HANCURNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI 2023

Banking on Biodiversity Collapse 2023

# Daftar Isi

## Table of Contents

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
Table of Contents	
<b>Temuan Utama</b>	<b>2</b>
Key Findings	
<b>1. Rangkuman dan Tren</b>	<b>5</b>
Overview and Trends	
A. Penyebab Deforestasi di Indonesia	6
A. Deforestation Drivers in Indonesia	
B. Makin Maraknya Perusahaan Bayangan	7
B. Proliferation of Shadow Companies	
C. Sektor Perbankan Indonesia dan Deforestasi	9
C. Indonesia's Banking Sector and Deforestation	
<b>2. Aliran Pembiayaan</b>	<b>11</b>
Key Findings	
A. Kredit	11
A. Credit	
B. Investasi	14
B. Investment	
<b>3. Perkembangan Kebijakan Lembaga Keuangan</b>	<b>16</b>
Financial Institutions' Policy Developments	
<b>4. Perkembangan Hukum dan Regulasi</b>	<b>18</b>
Legal and Regulatory Developments	
A. Omnibus Law Keuangan	18
A. Financial Omnibus Law	
B. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia	19
B. Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy	
C. Pelaporan Keberlanjutan	21
C. Sustainability Reporting	
D. Pengungkapan Risiko Terkait Iklim	21
D. Climate Risk Disclosures	
E. Pasar Karbon dan Perdagangan Karbon	23
E. Carbon Market and Trading	
F. Regulasi tentang Pemilik Manfaat/Beneficial Owner (BO)	24
F. Beneficial Ownership Regulation	
<b>5. Rekomendasi Utama Forests and Finance</b>	<b>25</b>
F&F Five Core Recommendations	
<b>Catatan Akhir</b>	<b>28</b>
Endnote	

# Temuan Utama

## Key Findings



**Bank-bank di Indonesia merupakan bank terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kreditor yang merisikokan hutan terbesar di Indonesia.**

**Indonesia's banks are the largest in Southeast Asia and the country's largest forest-risk creditors.**

Bank-bank ini menempati peringkat<sup>1</sup> pertama, ketiga, keenam dan kedua belas terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar (Juni 2023). Data F&F menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia menyediakan pembiayaan sekitar USD30,5 miliar (40%) dari total kredit bagi perusahaan kelapa sawit, *pulp* & kertas, karet dan kayu yang beroperasi di Indonesia. Empat dari lima kreditor terbesar yang merisikokan hutan itu adalah bank-bank Indonesia. Investor institusional di Indonesia relatif lebih sedikit menyediakan pembiayaan komoditas yang merisikokan hutan.

They are ranked<sup>1</sup> the first, third, sixth and twelfth largest by market capitalization (June 2023). F&F data indicates that Indonesian banks provided around US\$ 30.5 billion (40%) of total credit to palm oil, pulp & paper, rubber and timber companies operating in Indonesia. Four of the top five largest creditors to forest-risk commodities are Indonesian banks. Indonesia's institutional investors have relatively little exposure to forest-risk commodities.



**Kebijakan terkait lingkungan, sosial dan tata kelola (LST atau "ESG") masih tertinggal**  
**ESG policies are falling behind**

Penilaian F&F terhadap kebijakan perbankan tahun 2023 menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia masih tertinggal dibandingkan bank-bank lain di kawasan yang sama dalam memitigasi risiko ESG dari sektor-sektor yang merisikokan hutan terutama kelapa sawit dan bubur kertas&kertas (*pulp* and paper); seperti: deforestasi, pelanggaran HAM dan ketenagakerjaan serta emisi gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan. Bank-bank yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Jepang baru-baru ini telah mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan standar internasional No Deforestation, No Peat, No Exploitation ("NDPE"). Namun, belum ada satu pun dari lima bank terbesar di Indonesia itu yang mengadopsinya.

F&F assessments of bank policies in 2023 shows that Indonesia's banks are falling behind regional peers in mitigating the Environmental, Social and Governance (ESG) risks of forest-risk sectors such as palm oil and pulp & paper, such as deforestation, human rights and labor abuses and greenhouse gas emissions from land use change. Several regional peer banks from Malaysia, Singapore and Japan have recently adopted policies that align with the international No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) standard. However, none of Indonesia's top five banks have done so.



## Penerapan NDPE pada bank-bank dengan pengendali saham asing NDPE implementation of foreign-controlled banks

Beberapa kreditur penting yang merisikokan hutan dari Malaysia, Singapura dan Jepang merupakan pemegang saham pengendali di bank-bank di Indonesia. Komitmen NDPE ini berada pada tingkat grup perusahaan dan seharusnya dipatuhi juga sebagai syarat pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah non-NDPE mereka. Namun, implementasi komitmen ini sering kali tidak jelas.

Several important forest-risk creditors from Malaysia, Singapore and Japan are the controlling shareholders in Indonesian banks. These NDPE commitments are adopted at the group level and should affect financing to non-NDPE clients. However, the implementation of these commitments is often unclear.



## Sektor Keuangan belum membahas risiko terkait perusahaan bayangan Financial Sector not addressing risks of shadow companies

Salah satu pendorong terbesar deforestasi yang sedang berlangsung di Indonesia adalah bisnis 'perusahaan bayangan' yang berada di bawah kendali yang sama dengan grup-grup perusahaan produsen terbesar di sini. Bank kemungkinan besar terpapar dampak dari perusahaan bayangan ini; sementara, mereka juga belum mampu mempublikasikan kebijakan yang mensyaratkan para nasabah untuk menerapkan kebijakan yang sama di seluruh entitas grup perusahaan mereka.

Some of the largest drivers of ongoing deforestation in Indonesia are 'shadow companies' under common control with some of the country's biggest producer groups. Banks are likely exposed to the impacts of these shadow companies and are failing to publish policies expecting clients to apply their policies across all entities in their corporate group.



## Perbankan dituntut untuk mengungkapkan risiko iklim Banks under pressure to disclose climate risks

Emisi Pertanian, Kehutanan dan Tata Guna Lahan ("AFOLU") merupakan penyumbang terbesar emisi nasional Indonesia secara keseluruhan. Pembiayaan sektor-sektor padat karbon seperti kelapa sawit dan *pulp & paper* adalah perwujudan dari risiko iklim yang besar bagi sektor perbankan Indonesia. BRI menjadi bank Indonesia pertama yang menyiapkan laporannya sesuai dengan kerangka Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (Task Force on Climate related Financial Disclosure/"TCFD"),

Agriculture, Forestry and Land Use (AFOLU) emissions are the largest contributor to Indonesia's overall national emissions. Financing of carbon intensive sectors such as palm oil and pulp & paper represent material climate risk to Indonesia's banking sector. BRI became the first Indonesian bank to report against the framework of the Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), highlighting palm oil and pulp & paper as climate-risk sectors. While these disclosures are a positive step forward,

yang menyoroti kelapa sawit dan *pulp* & kertas sebagai sektor yang merisikokan iklim. Meskipun pengungkapan ini merupakan langkah maju yang positif, kebijakan mitigasi risiko BRI tidak mengatasi penyebab utama emisinya, yaitu: deforestasi, konversi lahan gambut, serta subsidensi dan kebakaran yang sedang berlangsung.

BRI's risk mitigation policies do not address the major drivers of emissions- deforestation, peatland conversion and ongoing subsidence and fire.



### **Pelemahan Taksonomi** **Weakening of Taxonomy**

Regulator keuangan Indonesia, OJK; telah mengusulkan perubahan pada Taksonomi Hijau Indonesia yang akan menghapus kategori 'tidak berkelanjutan', yang berarti semua kegiatan bersifat 'hijau/berkelanjutan' atau 'kegiatan transisi'. Hal ini kemungkinan besar akan menciptakan ketidakpastian bagi pasar keuangan dan risiko investasi pada aset-aset terdampar, sektor-sektor bisnis yang telah usang hingga menjadi karbon *lock-in* tinggi dan membuat transisi di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal.

Indonesia's financial regulator, OJK, has proposed changes to Indonesia's Green Taxonomy that would remove the 'unsustainable' category, in effect meaning all activities are either 'green/sustainable' or 'transition activities'. This is likely to create uncertainty for financial markets and risk investment in stranded assets and obsolescent sectors that 'lock in' high carbon activities and make future transitions more difficult and expensive.



### **Celah pada UMKM** **MSME Loophole**

Pedoman OJK membuat bank dapat melaporkan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mereka secara otomatis sebagai pembiayaan 'berkelanjutan'; tanpa kriteria lingkungan tambahan apa pun. Kategori ini dapat mencakup, misalnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan omzet tahunan hingga Rp 50 miliar (US\$ 3,2 juta). Pembiayaan UMKM mewakili proporsi terbesar pembiayaan 'berkelanjutan' di sektor perbankan Indonesia, sehingga mengandung risiko bawaan dari nasabah UMKM tersebut berupa deforestasi dan dampak buruk lainnya.

OJK guidance means that banks can report their Small and Medium Sized Enterprises (MSME) financing as automatically 'sustainable', without any additional environmental criteria. This category can include, for example, oil palm plantation companies with an annual turnover of up to IDR 50 billion (US\$ 3.2 million). MSME financing represents the largest proportion of 'sustainable' financing across Indonesia's banking sector and there is a significant risk such clients may be contributing to deforestation and other harms.

# Rangkuman dan Tren

## Overview and Trends

**E** misi gas rumah kaca dari Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (“AFOLU”) merupakan sumber emisi gas rumah kaca nasional terbesar di Indonesia.<sup>2</sup> Analisis terbaru menunjukkan bahwa konsesi perkebunan *pulp* saja mengemisi 103 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun<sup>3</sup>, hampir setara dengan 7% total emisi nasional Indonesia pada tahun 2020.

Strategi implementasi utama Nationally Determined Commitment (“NDC”) berdasarkan Perjanjian Iklim Paris adalah dengan mengurangi emisi penggunaan lahan dan mengubah lahan dan hutan di negara tersebut menjadi Penyerap Karbon Bersih (“carbon net sink”) pada tahun 2030.<sup>4</sup> Hal ini memerlukan penurunan laju hilangnya hutan dan konversi lahan gambut hingga 2030, serta upaya keras merestorasi lahan gambut yang cukup luas. Tujuan NDC ini selaras dengan komitmen Indonesia untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya hutan, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 berdasarkan Deklarasi Glasgow tentang Hutan dan Tata Guna Lahan dan Global Biodiversity Framework (“GBF”).

GBF mengisyaratkan bahwa tujuan-tujuan ini memerlukan penyesuaian signifikan terhadap aliran dana swasta dan publik. Laporan singkat ini menyoroti

**G**reenhouse gas emissions from Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) is the largest source of Indonesia’s national greenhouse gas emissions.<sup>2</sup> Recent analysis indicates that land use emissions from growing trees for wood pulp emit an annual average of 103 million tons CO<sub>2</sub>e per year<sup>3</sup>, equivalent to nearly 7% of Indonesia’s total national emissions in 2020.

A primary implementing strategy for achieving its Nationally Determined Contributions (NDC) under the Paris Climate Agreement is to reduce these land use emissions and transform the country’s land and forests into a Net Carbon Sink by 2030.<sup>4</sup> This will require a large and sustained reduction in the rate of forest loss and peatland conversion by 2030, and the restoration of vast areas of peatland. These NDC aims align with Indonesia’s commitments to halt and reverse forest loss, land degradation and biodiversity loss by 2030 under the Glasgow Declaration on Forests and Land Use, and the Global Biodiversity Framework (GBF) respectively.

The GBF recognises that these goals require a major realignment of private and public financial flows. This brief highlights the current misalignment between the finance flowing to companies operating in Indonesia’s forest landscapes, and these environmental goals.

ketidaksiharasan antara pembiayaan yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia dan tujuan-tujuan lingkungan hidup.

Selain permasalahan lingkungan hidup yang mendesak, komoditas yang merusak hutan juga terus mendorong terjadinya pelanggaran hak atas tanah, hak masyarakat adat, dan konflik sosial terkait. Sepanjang tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendokumentasikan 212 konflik agraria, dengan lebih dari satu juta hektar lahan berada dalam 'status konflik' dan berdampak pada hampir 350.000 keluarga.<sup>5</sup>

Alongside pressing environmental issues, forest-risk commodities continue to drive the violation of land rights, Indigenous rights and related social conflict. Throughout 2022, the Konsorsium Pembaruan Agraria (Agrarian Reform Consortium) documented 212 agrarian conflicts, with over a million hectares of land in 'conflict status' and affecting close to 350,000 families.<sup>5</sup>



## Penyebab Deforestasi di Indonesia Deforestation Drivers in Indonesia



**Deforestasi terbaru di lahan gambut kaya karbon di Kalimantan Barat, Agustus 2023.**

Recent deforestation on carbon-rich peatlands in West Kalimantan, August 2023.

Sumber Source: Auriga Nusantara

Deforestasi di Indonesia telah menurun secara signifikan selama dekade terakhir, yang terlihat dari turunnya angka hilangnya hutan primer sebesar 64% pada periode 2020-2022 dibandingkan rata-rata pada tahun 2015-2017.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan oleh upaya perlindungan hutan oleh Pemerintah yang lebih kuat, harga komoditas yang lemah, dan penerapan kebijakan NDPE secara sukarela oleh pelaku pasar dan keuangan, terutama yang diterapkan pada sektor sawit.<sup>7</sup>

Meskipun ada kemajuan secara keseluruhan, berbagai analisis menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan deforestasi yang mengkhawatirkan selama dua tahun

Deforestation in Indonesia has dropped significantly over the last decade, reducing primary forest loss by 64% in the 2020-2022 period compared to the average from 2015-2017.<sup>6</sup> This has been attributed to stronger government forest protection, weak commodity prices and implementation of voluntary No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policies by market and financial actors, mainly applied to the palm oil sector.<sup>7</sup>

Despite this overall progress, multiple analyses indicate that deforestation has shown a concerning uptick over the last two years (2022-24). Deforestation for wood pulp saw a fivefold surge in 2022 compared with 2017.<sup>8</sup>



terakhir ini (2022-2024). Deforestasi dari *wood pulp* mengalami lonjakan lima kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2017.<sup>8</sup> Analisis deforestasi di Provinsi Riau juga mencatat peningkatan deforestasi sebesar 69% pada tahun 2023 dibandingkan rata-rata tahun 2020-22, dengan kontributor terbesar *pulp & paper*.<sup>9</sup> Sementara itu, konversi lahan untuk industri minyak sawit juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023.<sup>10</sup>

Sebagian besar deforestasi ini tidak lagi dilakukan secara terbuka oleh perusahaan-perusahaan produsen utama, namun oleh produsen-produsen ‘pembocor’ yang tidak terlalu terkenal, yang seringkali memiliki struktur kepemilikan yang tidak jelas. Perusahaan-perusahaan ini lebih terisolasi dari risiko pasar NDPE dan beroperasi dalam rantai pasokan yang kompleks tanpa ketertelusuran yang memadai.<sup>11</sup>

Seringkali, hanya sedikit data yang tersedia mengenai pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan kecil yang dimiliki oleh swasta; karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memperoleh pembiayaan dari pasar modal (misalnya melalui penerbitan saham atau obligasi); sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk mempublikasikan rincian pembiayaan mereka dalam laporan tahunan. Pembiayaan itu kemungkinan besar berasal dari bank-bank domestik di Indonesia yang memiliki proses uji tuntas ESG yang lemah untuk menangkal deforestasi dan risiko sosial dan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko dan uji tuntas oleh bank-bank domestik di Indonesia sangat penting untuk mengatasi persoalan produsen ‘pembocor’ dan untuk menghentikan deforestasi.

Analysis of deforestation in Riau Province also notes a 69% increase in deforestation in 2023 compared with 2020-22 averages, with the largest driver being pulp & paper.<sup>9</sup> While conversion for industrial oil palm also saw a marked increase in 2023.<sup>10</sup>

Most of this deforestation is no longer carried out openly by flagship producer companies, but by lower profile ‘leakage’ producers, often with opaque ownership structures. These companies are more insulated from NDPE market risks and operate in complex supply chains without adequate traceability.<sup>11</sup>

There is often little available data on the financing of smaller, privately owned, leakage companies as they do not source finance from capital markets (e.g. issue shares or bonds) or publish details of their financing in annual reports. Their financing is likely to come from domestic Indonesian banks that have weak ESG due diligence processes to safeguard against deforestation and other social and environmental risks. Strengthening risk management and due diligence by Indonesian domestic banks is therefore critical to tackling leakage producers and ending deforestation.



## Makin Maraknya Perusahaan Bayangan Proliferation of Shadow Companies

Salah satu pendorong terbesar deforestasi adalah perusahaan-perusahaan *low profile* yang mempunyai saham pengendali yang sama dengan perusahaan-perusahaan produsen besar di Indonesia.<sup>12</sup> Hubungan mereka dikaburkan oleh struktur perusahaan yang rumit, yurisdiksi mengenai kerahasiaan, dan pemegang saham *nominee*. Perusahaan-perusahaan produsen terkemuka yang sering kali terdaftar di bursa memiliki komitmen publik terhadap NDPE dan

Several of the largest drivers of deforestation are low profile companies under common control with major Indonesian producer companies.<sup>12</sup> Their links are obscured by complex corporate structures, secrecy jurisdictions, and nominee shareholders. The high profile, often publicly listed producer companies have public NDPE commitments and deny that these ‘shadow companies’ are part of their wider corporate group. Acknowledging such control of these “off



menyangkal bahwa 'perusahaan bayangan' ini adalah bagian dari grup perusahaan mereka. Mengakui adanya kendali atas kegiatan bisnis di luar neraca/pembukuan ini berisiko terhadap keberlanjutan akses mereka terhadap pembeli dan pelaku keuangan yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ESG.

Beberapa merek besar beradaptasi terhadap ancaman perusahaan bayangan ini dengan menerapkan kebijakan ESG di seluruh grup perusahaan pemasok mereka, yang didefinisikan oleh Accountability Framework Initiative (AFI) sebagai *"totalitas badan hukum di mana perusahaan berafiliasi dalam suatu hubungan di mana salah satu pihak mengendalikan tindakan atau kinerja pihak lain"*. Namun, bahkan bank-bank 'pemimpin' pasar pun belum mengadopsi pendekatan grup korporasi atas kebijakan mereka.

balance sheet" operations risks continued access to buyers and financial actors that have relevant ESG policies.

Some major brands are adapting to the threat of shadow companies by applying their ESG policies across their supplier's entire corporate group, defined by the Accountability Framework Initiative (AFI) as *"the totality of legal entities to which the company is affiliated in a relationship in which either party controls the actions or performance of the other"*. However, even 'leader' banks have yet to adopt a corporate group approach to their policies.



**Konstruksi pabrik pengolahan bubuk kertas Phoenix Resources International di Tarakan, Kalimantan Utara, perusahaan bayangan tersamar di bawah kendali Grup Royal Golden Eagle.<sup>13</sup>**

Construction of a new pulp mill in Tarakan, North Kalimantan by Phoenix Resources International, an opaque shadow company under common control with the Royal Golden Eagle Group.<sup>13</sup>

Sumber Source: RAN



## Sektor Perbankan Indonesia dan Deforestasi Indonesia's Banking Sector and Deforestation

Bank-bank kreditor Indonesia menduduki posisi teratas dan menjadi bank terbesar di Asia Tenggara, menyalip bank-bank lain yang berasal dari Singapura dan Malaysia dalam hal kapitalisasi pasar. Namun, mereka tertinggal dalam hal kebijakan mitigasi risiko pada isu-isu penting seperti perubahan iklim, deforestasi dan HAM (lihat bagian 3).


Indonesia's lenders occupy the top slots and constitute several of the largest banks in Southeast Asia, overtaking many of their peer banks in Singapore and Malaysia in terms of market capitalization. However, they are falling behind in risk mitigation policies on critical issues like climate change, deforestation and human rights (see section 3).


Portofolio perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan besar terpapar risiko-risiko ESG yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis, sehingga dapat menimbulkan risiko material bagi bank dan pemegang sahamnya, serta risiko makroekonomi yang lebih luas terhadap sektor keuangan Indonesia.

Hal ini berarti bahwa sebenarnya, kelompok perbankan internasional dengan kebijakan ESG yang lebih kuat adalah pemegang saham pengendali/mayoritas di bank-bank Indonesia. Saat ini setidaknya ada lima kreditor penting Indonesia untuk komoditas yang merisikokan hutan yang dikendalikan oleh kelompok perbankan yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Jepang – yang sudah memiliki komitmen NDPE, yaitu:


Their portfolios are likely exposed to higher ESG risks than their peers, which can translate to material risk to the bank and its shareholders, and wider macroeconomic risks to the Indonesian financial sector.

This has meant that international banking groups with stronger ESG policies become controlling/majority shareholders in Indonesian banks. There are now at least five important Indonesian creditors to forest-risk commodities controlled by Malaysian, Singapore and Japanese banking groups - with NDPE commitments, including:

 (IDX:BDMN)  
Controlling Shareholder  
94% owned by  
MUFU Group (Japan)

 (IDX:NISP)  
Controlling Shareholder  
85% owned by  
OCBC Group (Singapore)

 (IDX:BNGA)  
Controlling Shareholder  
91% owned by  
CIMB Group (Malaysia)

 (IDX:BNII)  
Controlling Shareholder  
79% owned by  
Maybank (Malaysia)

 (not listed)  
Controlling Shareholder  
Subsidiary of  
SMBC Group (Japan)

---

Pada tahun 2021, OJK meliberalisasi aturan mengenai kepemilikan asing pada bank-bank Indonesia.<sup>14</sup> Untuk menstabilkan sektor perbankan, OJK juga telah menaikkan jumlah cadangan modal yang perbankan pada akhir tahun 2022, yang telah meningkatkan investasi asing di bank-bank di Indonesia.<sup>15</sup> Kebijakan ESG yang dilakukan oleh bank dan investor internasional dapat menjadi insentif bagi penerapan kebijakan yang lebih baik di sektor perbankan Indonesia.

In 2021, the OJK liberalized foreign ownership of Indonesian banks.<sup>14</sup> To stabilize the banking sector, OJK has also increased the amount banks need to hold in capital reserves by the end of 2022, which has increased foreign investment in Indonesia's banks.<sup>15</sup> The ESG policies of international banks and investors may incentivize the adoption of stronger policies across Indonesia's banking sector.



**Gedung OJK.**  
OJK Building.

# Aliran Pembiayaan

## Financial Flows

## A

### Kredit

#### Credit

Pada periode 2016-September 2023, pinjaman dan penjaminan yang merisikokan hutan berfluktuasi sekitar USD 9 miliar per tahun, dengan total USD 76 miliar pada periode tersebut. Penting untuk dicatat bahwa data Forests & Finance tidak menyajikan seluruh pembiayaan perusahaan swasta yang merisikokan hutan, sehingga pembiayaan riil bagi komoditas yang merisikokan hutan pastinya jauh lebih besar dibandingkan dengan angka yang disajikan di sini.

Terjadi lonjakan kredit yang besar pada tahun 2021, khususnya di sektor *pulp & paper*. Lonjakan keseluruhan ini berkorelasi dengan peningkatan tajam harga komoditas global termasuk *pulp* dan minyak sawit pada tahun 2021.<sup>16</sup> Turunnya harga komoditas dan naiknya suku bunga kemungkinan besar mendorong penurunan kredit yang merisikokan hutan menjadi USD6,6 miliar pada tahun 2022.

Sepanjang periode tersebut, lebih dari separuh kredit yang merisikokan hutan di Indonesia disalurkan ke sawit (US\$ 39 miliar), diikuti oleh *pulp & paper*: USD 28 miliar, atau sedikit di bawah 40%. Karet menyerap sekitar 10% (USD7,6 miliar).

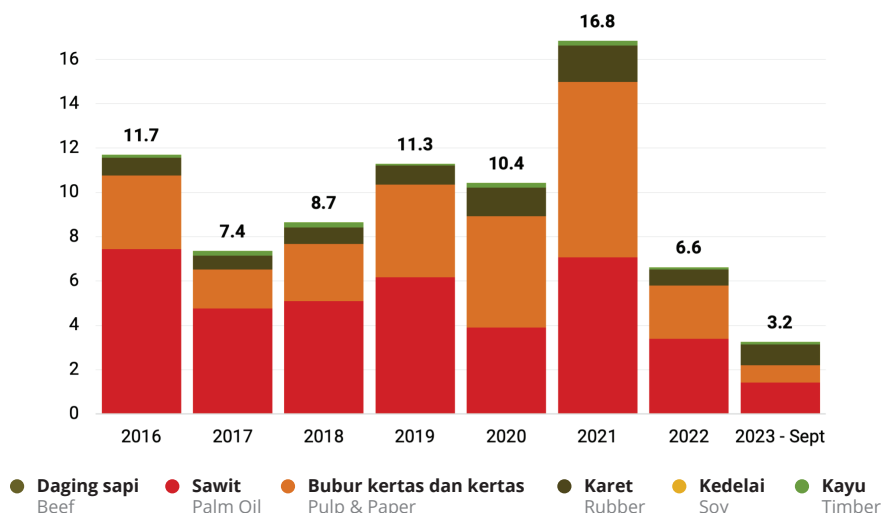
In the period 2016-September 2023, forest-risk loans and underwriting services fluctuated around approximately US\$ 9 billion per year, with a total of US\$ 76 billion in the period. It is important to note that Forests & Finance only captures financing where this information is available on financial databases or published by company sources such as their annual reports. As many forest-risk companies do not attract financing on capital markets (e.g. do not issue bonds or shares) or publish financial data in annual reports, the real scale of forest-risk financing will be considerably larger.

There was a large jump in credit in 2021, particularly in the pulp & paper sector. This overall jump correlates with the sharp increase in global commodity prices including pulp and palm oil in 2021.<sup>16</sup> The subsequent drop in commodity prices and rise in interest rates likely drove the decline in forest-risk credit to US 6.6 billion in 2022. Financing data for 2023 is likely to increase considerably once companies publish their annual reports in April-June 2024. There may also be some smaller changes in the 2022 data.

Over the entire period, more than half the forest-risk credit to the country was directed to palm oil (US\$ 39 billion), followed by pulp & paper, accounting for just under 40% (US\$ 28 billion). Rubber attracted approximately 10% (US\$ 7.6 billion).

## Grafik 1: Arus kredit tahunan per komoditas (2016-September 2023, USD miliar)

Figure 1: Annual credit flows by commodity (2016-September 2023, US\$ bln)

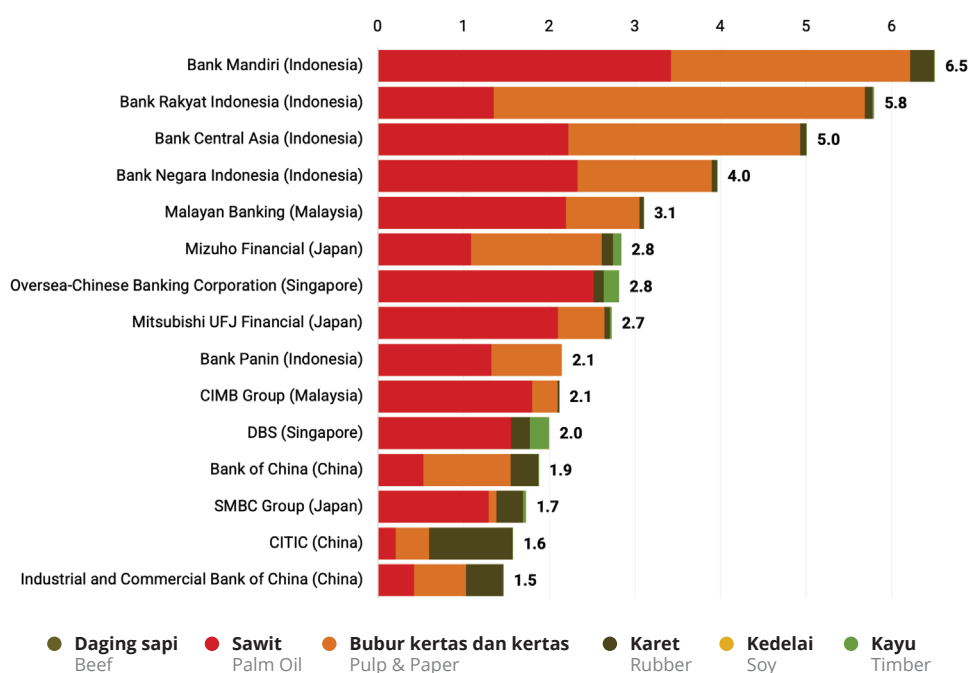


Grafik 2 menunjukkan kreditor terbesar untuk komoditas yang merisikokan hutan di Indonesia. Bank BUMN Mandiri, memberikan layanan pinjaman dan penjaminan emisi terbanyak, dengan total USD6,5 miliar. Disusul oleh Bank Rakyat Indonesia (USD5,8 miliar). Bank swasta terbesar di Indonesia – Bank Central Asia – memberikan kredit ketiga yang paling berisiko terhadap hutan pada periode penelitian (USD5,0 miliar). Bank-bank internasional menyediakan USD 45,7 miliar atau 60% dari kredit yang dapat diidentifikasi; dengan kreditor terbesarnya yang berasal dari Malaysia, Jepang, Singapura dan China.

Figure 2 shows the largest creditors to Indonesian forest-risk commodities. Overall, Indonesian banks provided around 40% of the credit identified. State-owned bank Bank Mandiri provided the most loans and underwriting services, totalling US\$ 6.5 billion. It was followed by its peer Bank Rakyat Indonesia (US\$ 5.8 billion). The largest privately owned Indonesian commercial bank - Bank Central Asia - provided the third most forest-risk credit in the period of study (US\$ 5.0 billion). International banks provided US\$ 45.7 billion, or 60% of credit identified, with the largest creditors banks being headquartered in Malaysia, Japan, Singapore and China.

## Grafik 2: 15 Kreditor terbesar, per komoditas (2016-September 2023; dalam USD miliar)

Figure 2: Top 15 creditors, per commodity (2016-September 2023, US\$ bln)



Grafik 3 menyajikan data tentang konsentrasi pembiayaan yang merisikokan hutan dan skala paparannya terhadap sejumlah kecil kelompok perusahaan. Sinar Mas Group (SMG) – pengendali Asia Pulp & Paper dan Golden Agri Resources – menerima 38% dari kredit yang teridentifikasi.

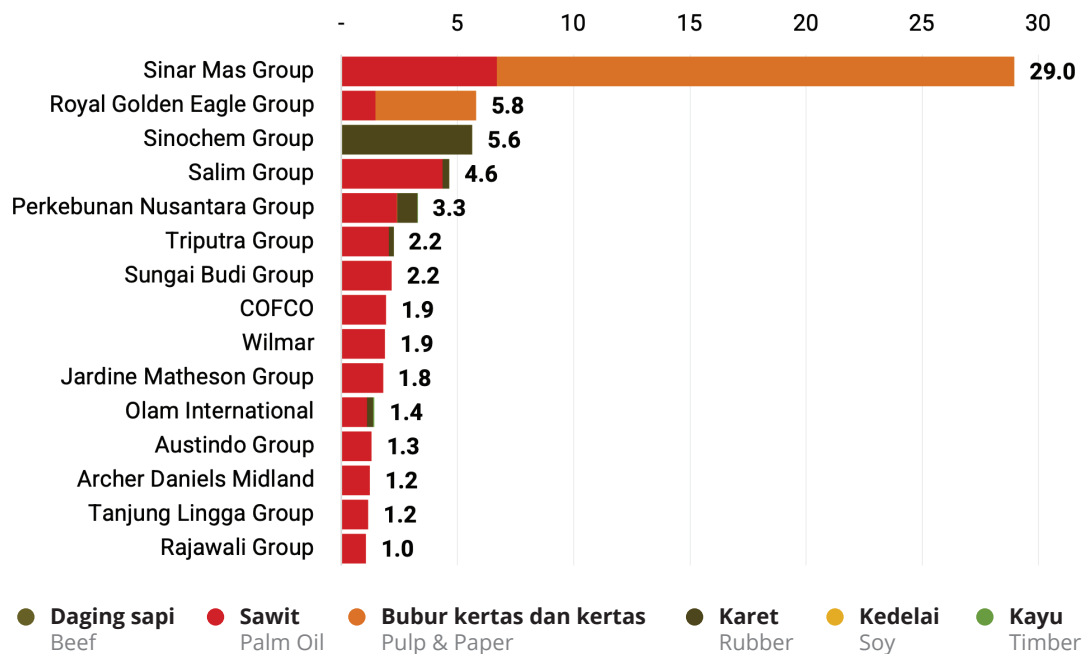
Grup Royal Golden Eagle (RGE) menerima US\$ 5,8 miliar. Mirip dengan SMG, pembiayaan kepada RGE sebagian besar ditujukan pada *pulp & paper*, dan sebagian kecil ditujukan pada minyak sawit. Perusahaan kimia Tiongkok Sinochem menarik dana sebesar US\$ 5,6 miliar untuk bisnis karetinya di Indonesia.

Figure 3 highlights the concentration of forest-risk financing and the scale of exposure to a small number of corporate groups. Sinar Mas Group- controlling Asia Pulp & Paper and Golden Agri Resources- received 38% of the identified credit.

Royal Golden Eagle Group received US\$ 5.8 billion. Similar to SMG, financing to RGE was mostly directed to pulp & paper, with a smaller proportion directed to palm oil. Chinese chemical company Sinochem attracted US\$ 5.6 billion for its rubber-related operations in Indonesia.

**Grafik 3: 15 Nasabah terbesar, per komoditas (2016-September 2023, dalam USD miliar)**

**Figure 2: Top 15 clients, per commodity (2016-September 2023, US\$ bln)**



**Memanen tandan buah segar sawit.**  
Harvesting oil palm.  
Sumber Source: RAN



## Investasi Investment

Para investor memegang obligasi dan saham yang merisikokan hutan senilai US\$ 11 miliar yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas yang merisikokan hutan di Indonesia. Sebagian besarnya ditanamkan pada minyak sawit, yang mencakup lebih dari 90% (US\$ 10 miliar). Sekitar 5% ditanamkan pada *pulp & paper* (US\$ 540 juta) dan 3% ditanamkan pada karet (US\$ 324 juta).

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, tiga investor milik pemerintah Malaysia bersama-sama memegang obligasi senilai USD2,62 miliar dan saham di perusahaan-perusahaan yang merisikokan hutan, yang sebagian besarnya adalah konglomerat Malaysia yang memiliki bisnis minyak sawit dan karet di Indonesia. Para investor di AS memiliki sekitar USD4,4 miliar, sebagian besar di perusahaan sawit terdaftar di pasar modal dan memiliki bisnis di Indonesia.

Berbeda dengan Malaysia, yang merupakan salah satu produsen dan eksportir komoditas yang merisikokan hutan, investor di Indonesia tidak melakukan investasi besar pada perusahaan produsen. Oleh karena itu, sektor keuangan Indonesia sebagian besar terpapar risiko melalui kredit dibandingkan dengan investasi.

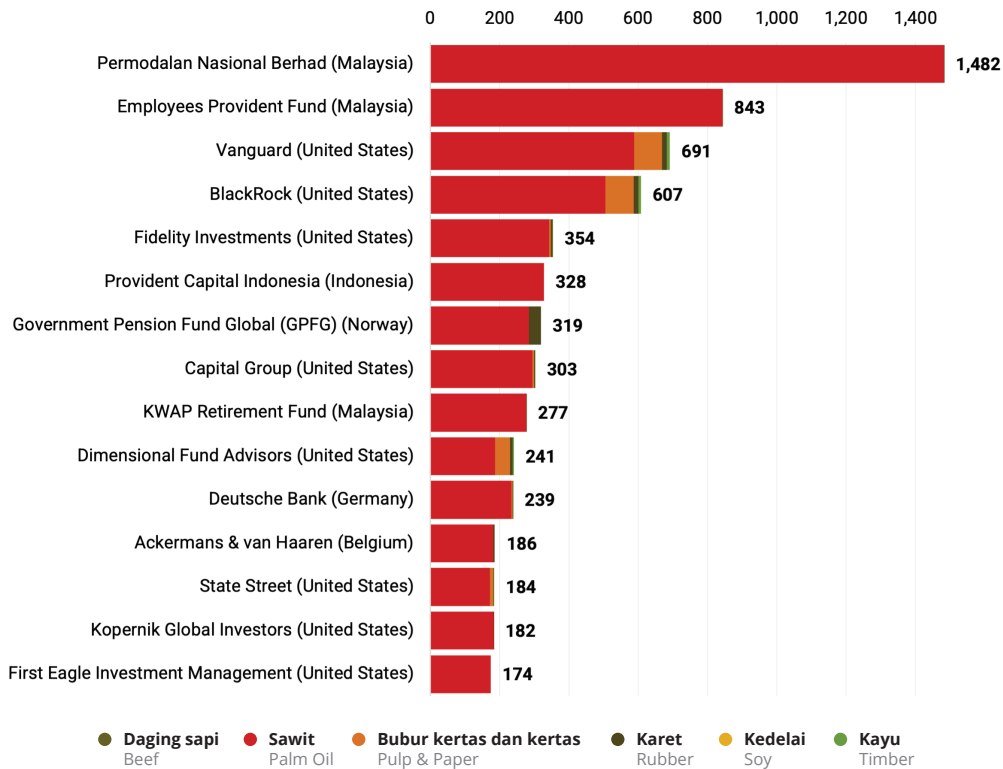
Investors held US\$ 11 billion in forest-risk bonds and shares issued by companies active in forest-risk commodities in Indonesia. The vast majority of these were attributable to palm oil, accounting for more than 90% (US\$ 10 billion). Approximately 5% was attributable to pulp & paper (US\$ 540 million) and 3% to rubber (US\$ 324 million).

As figure 4 shows, three Malaysian state-linked investors together hold US \$2.62 billion bonds and shares in forest-risk companies, the vast majority of which are Malaysian conglomerates with palm oil and rubber operations in Indonesia. US-based investors hold around US\$ 4.4 billion, mostly in listed palm oil companies with businesses in Indonesia.

Unlike Malaysia, another regional producer-exporter of forest-risk commodities, Indonesian state investors do not hold major investments in producer companies. Indonesia's financial sector is therefore largely exposed through credit rather than investment.

### Grafik 4: 15 Investor terbesar, per komoditas (September 2023, dalam USD juta)

Figure 4: Top 15 investors, per commodity (2023 September, US\$ millions)

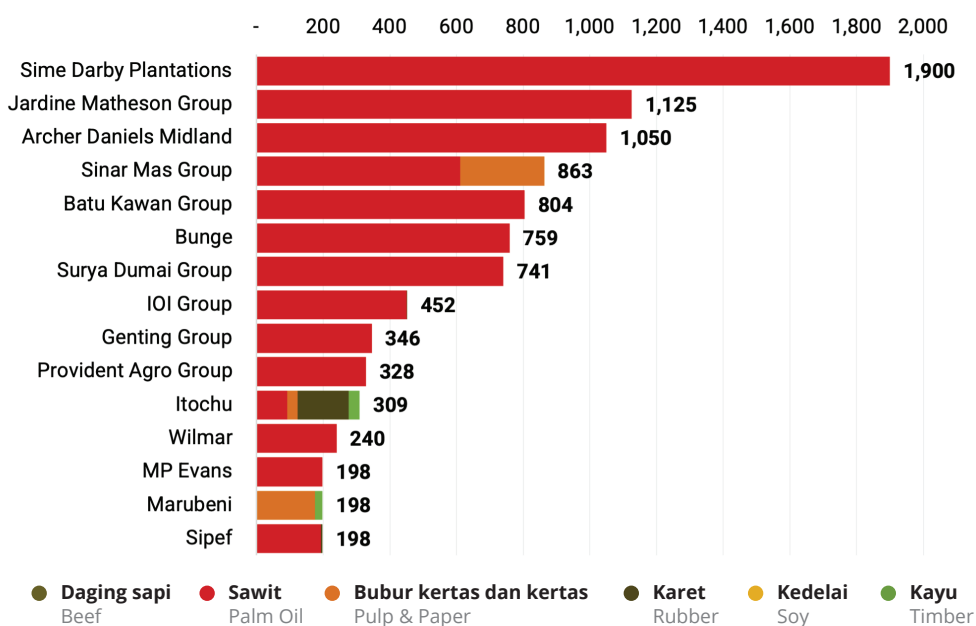


Perkebunan Sime Darby Malaysia menggalang dana investasi tertinggi melalui aktivitas bisnisnya di Indonesia: USD1,9 miliar. Konglomerat Jardine Matheson yang berbasis di Hong Kong - pemegang saham pengendali PT Astra Agro Lestari - menggalang dana sebesar USD1,1 miliar.

Malaysian Sime Darby Plantations attracted the highest level of investments attributable to its activities in Indonesia, with US\$ 1.9 billion. Hong Kong-based conglomerate Jardine Matheson - controlling shareholder in PT Astra Agro Lestari - attracted US\$ 1.1 billion.

### Grafik 5: 15 Investee Terbesar, per komoditas (September 2023, USD juta)

Figure 5: Top 15 investees, per commodity (2023 September, US\$ millions)





# Perkembangan Kebijakan Lembaga Keuangan

## Financial Institutions' Policy Developments



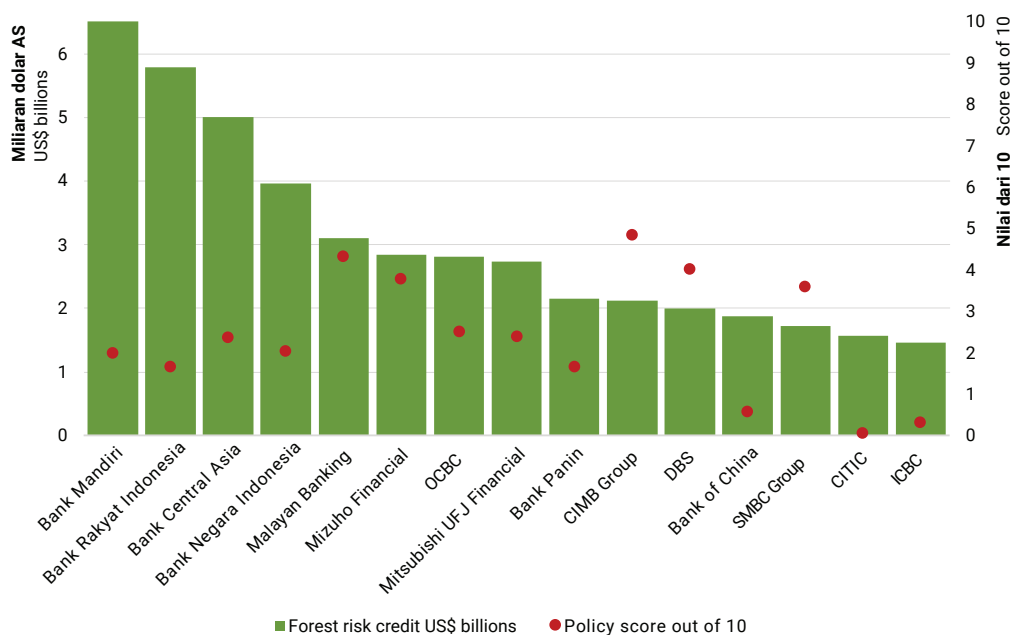
**BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat ini masing-masing menduduki peringkat pertama, ketiga, keenam dan kedua belas bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasar, menyalip bank pesaing mereka dari Singapura dan Malaysia.<sup>17</sup>**

Indonesian banks BCA, BRI, Mandiri and BNI are currently respectively ranked the first, third, sixth and twelfth largest banks in Southeast Asia by market capitalization, overtaking competitor banks from Singapore and Malaysia.<sup>17</sup>

Meskipun bank-bank Indonesia ini telah melampaui bank lain di kawasan yang sama dalam hal ukuran, mereka masih tertinggal jauh dalam hal kebijakan ESG pada sektor-sektor berisiko tinggi seperti kelapa sawit dan *pulp & paper*, yang kreditanya justru sangat tinggi; sehingga kerentanan mereka pun menjadi tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi investor perbankan dan para regulator. Pola kelembaman ini juga terlihat dalam respons mereka terhadap perubahan iklim, dimana belum ada satu pun bank besar di Indonesia yang menandatangani komitmen sukarela terhadap perubahan iklim yang terendah sekalipun, seperti Net Zero Banking Alliance (NZBA), Science Based Targets Initiative (SBTi) atau Principles for Responsible Banking (UNPRB), yang memerlukan transparansi dan penetapan target.

While Indonesia's banks have overtaken these regional peers in size, they are falling significantly behind in terms of their ESG policies on high risk sectors such as palm oil and pulp & paper that they are highly exposed to. This should be a serious concern to bank investors and regulators. This laggard pattern is also evident on their response to climate change, with no major Indonesian bank having signed up to even the weakest voluntary commitments on climate change such as the Net Zero Banking Alliance (NZBA), Science Based Targets Initiative (SBTi) or UN Principles for Responsible Banking (UNPRB), which require a measure of transparency and target setting.

**Grafik 6: 15 Kreditor Terbesar dan Skor Kebijakannya**  
**Figure 6: Top 15 Creditors And Their Policy Scores**



Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia memperoleh skor rata-rata 18% untuk kebijakan mitigasi risiko hutan mereka. Secara keseluruhan, Bank Central Asia mempunyai kebijakan yang paling kuat, dengan skor 24%. Disusul oleh Bank Negara Indonesia dengan 21%. Di antara lembaga keuangan non-Indonesia yang mempunyai hubungan keuangan yang merisikokan hutan dengan nilai tertinggi dengan Indonesia, lembaga keuangan Malaysia mempunyai kebijakan yang paling kuat. Yang pertama adalah CIMB dengan 49%, diikuti oleh Employee Provident Fund dengan 45% dan Maybank dengan 43%. DBS Singapura mendapat skor 40% sementara OCBC mendapat skor buruk 26%.

Indonesian financial institutions scored on average 18% for their forest-risk mitigation policies. Overall, Bank Central Asia had the overall strongest policies, scoring 24%. It was followed by Bank Negara Indonesia with 21%. Among the non-Indonesian financial institutions with the highest value forest-risk financial links to Indonesia, Malaysian financial institutions had the strongest policies. First among them was CIMB with 49%, followed by Employees Provident Fund with 45% and Maybank with 43%. Singapore's DBS scored 40% while OCBC scored a poor 26%.

**Kebijakan perbankan di Indonesia cenderung lebih kuat terhadap risiko lingkungan dan tata kelola dibandingkan risiko sosial. Kesenjangan kinerja dalam isu-isu sosial terutama terlihat di BRI.**

Indonesian bank policies tended to be slightly stronger for environmental and governance risks than for social risks. This performance gap on social issues was particularly pronounced at BRI.

**Gedung Bank BRI.**  
BRI Building.

# Perkembangan Hukum dan Regulasi

## Legal and Regulatory Developments

## A

### Omnibus Law Keuangan Financial Omnibus Law

Pada bulan Januari 2023, Indonesia memberlakukan undang-undang payung baru yang dikenal sebagai Omnibus Law Sektor Keuangan Indonesia, yaitu UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memperkenalkan perubahan besar terhadap penerapan 'keuangan berkelanjutan'. Melalui serangkaian peraturan yang saling berhubungan, undang-undang ini berdampak pada semua aspek lain mengenai bagaimana 'keuangan berkelanjutan' akan diterapkan di Indonesia termasuk taksonomi, pasar karbon, dan aspek lainnya (dibahas pada bagian di bawah). P2SK memberikan 'keuangan berkelanjutan' - yang sebelumnya hanya terdapat dalam peraturan OJK - status hukum yang jauh lebih tinggi dan menyatakan bahwa Bank Indonesia (Bank Sentral) dan Kementerian Keuangan juga akan menentukan implementasinya bersama OJK melalui Komite Keuangan Berkelanjutan.

UU P2SK juga mengamankan dibentuknya Badan Supervisi OJK, yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu

In January 2023, Indonesia enacted a new umbrella law known as Indonesia's Financial Sector Omnibus Law (PPSK) which introduced sweeping changes to the application of 'sustainable finance'. Through an extensive list of connecting regulations, the law impacts many aspects of how 'sustainable finance' will be implemented in Indonesia including taxonomies, bank supervision and carbon markets (covered in sections below). P2SK gives 'sustainable finance', previously a concept only found in OJK regulation, far higher legal status and states that Bank Indonesia (the Central Bank) and Ministry of Finance will also determine its implementation alongside OJK through a newly created Committee of Sustainable Finance.

The law also creates a supervision body for the OJK, tasked with assisting the lower house legislature (DPR) to monitor the performance, accountability, independence, transparency and institutional credibility of OJK. Illegal and abusive operations by Fintech companies has become an important issue and this new body has

untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan OJK. Kegiatan bisnis ilegal dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* telah menjadi isu yang cukup penting; badan baru ini mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan industri, dan juga dapat memberikan peluang untuk pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja lingkungan dan sosial bank-bank di Indonesia.<sup>18</sup>

the authority to receive reports from the public and industry, and may also provide opportunities for stronger supervision on environmental and social performance of Indonesian banks.<sup>18</sup>



## Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy

Taksonomi adalah kerangka kerja yang dimaksudkan untuk memberikan panduan komprehensif kepada pasar keuangan tentang kegiatan ekonomi yang berkelanjutan atau kegiatan ekonomi transisi. Taksonomi yang baik dapat memberi keyakinan dan kepastian kepada pelaku pasar mengenai di mana mereka mengalokasikan portofolionya. Hal ini juga dapat mempermudah tingkat pelacakan aliran keuangan berkelanjutan, dan dengan demikian membentuk insentif dan kebijakan lainnya.

Taxonomies are frameworks intended to provide guidance to financial markets on economic activities or sectors that are sustainable or transition activities. They can give confidence and assurance to markets on where they allocate their portfolio. It can also make tracking of sustainable financial flows easier to measure, and thereby shape incentives and other policies.

### Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia<sup>19</sup> Legal Hierarchy in Indonesia<sup>19</sup>



P2SK mengatur agar OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan membentuk komite untuk berkoordinasi dan menetapkan kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk pengembangan Taksonomi Berkelanjutan.

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) terbit pada bulan Februari 2024 dan mengikuti kerangka Taksonomi ASEAN, yang diperbarui pada tahun 2023. TKBI menggantikan Taksonomi Hijau/Taksonomi Hijau 1.0; yang telah dikembangkan oleh OJK sebelumnya dan diterbitkan pada tahun 2022.<sup>20</sup>

TKBI kini mencakup aspek sosial dan lingkungan hidup, yang secara umum merupakan hal yang positif. Namun, naskah taksonomi ini dikritik karena secara signifikan terlihat melemahkan pedoman lingkungan hidup di beberapa sektor termasuk energi dan pertambangan, sehingga memberikan sinyal yang membingungkan bagi pelaku pasar keuangan mengenai di mana mereka harus mengalokasikan modalnya.<sup>21</sup> Meskipun taksonomi ASEAN mengusulkan kategorisasi model lampu lalu lintas (hijau/berkelanjutan, kuning/transisi dan merah/tidak pernah berkelanjutan), TKBI telah menghapuskan kategori 'merah' sama sekali, dan untuk sejumlah kegiatan berdampak tinggi – misalnya, pertambangan nikel - tidak ada batas waktu yang jelas mengenai berapa lama kategori transisi ini akan berakhir.

P2SK stipulates that OJK, Bank Indonesia and the Ministry of Finance shall form a committee to coordinate and determine policies for sustainable finance, including the development of a Sustainable Taxonomy. The Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) was published in February 2024 and follows the framework set out in the ASEAN Taxonomy, updated in 2023. TKBI supersedes the Green Taxonomy/Taxonomy Hijau 1.0; which had been developed by OJK and published in 2022.<sup>20</sup>

The TKBI now includes social as well as explicit environmental aspects, which is broadly positive. However, it has been criticized for significantly weakening environmental guidance on sectors including energy and mining, sending confusing signals to financial markets on where to allocate their capital.<sup>21</sup> While the ASEAN taxonomy proposed a traffic light categorization (green/sustainable, yellow/transition and red/never sustainable), the TKBI has removed the 'red' category altogether, and for a number of high impact activities - e.g. nickel mining - fails to provide clear sunseting timelines for how long they can remain in the transition category.



**Pada tahun 2024, TKBI fokus pada sektor energi, sehingga panduan teknis yang disediakan adalah bagi sektor energi; tidak menyediakan panduan mencukupi bagi sektor kehutanan dan pertanian – yang mendorong emisi AFOLU – yang justru merupakan sumber emisi nasional terbesar saat ini.**

In 2024, TKBI is only providing technical guidance for energy sectors, and so has not yet published such guidance for forestry and agriculture sectors- which drive AFOLU emissions- the largest source of national emissions.



Kelemahan TKBI menyebabkan risiko pembiayaan dapat terus mengalir ke kegiatan dan teknologi yang ketinggalan zaman; sehingga dapat menciptakan karbon *lock in* yang tinggi, sehingga membuat transisi di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal. Bagi sektor keuangan, hal ini juga menimbulkan risiko aset terdampar (stranded asset).

TKBI's weaknesses risk finance flowing to outdated activities and technologies that create high carbon lock-ins, making future transitions more difficult and expensive. For the financial sector, this also creates risk of stranded assets.



## Pelaporan Keberlanjutan Sustainability Reporting

Regulasi mengenai Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2016 mengharuskan bank, perusahaan publik dan emiten untuk menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan dan membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur yang ada sudah dipatuhi oleh perbankan, namun kualitas laporan tersebut seringkali buruk dan tidak mengikuti pedoman pelaporan standar.

Peraturan OJK mewajibkan bank untuk melaporkan portofolio pembiayaan ESG mereka terhadap 12 kegiatan berkelanjutan (11 kegiatan 'bisnis hijau' dan 1 kegiatan sosial: pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Artinya, pembiayaan UMKM dianggap berkelanjutan secara otomatis, tanpa ada pertimbangan lingkungan, sosial atau tata kelola lain. Aturan ini mengandung risiko besar, yaitu bank dapat membiayai deforestasi dan dampak buruk lainnya kepada nasabah UMKM mereka, yaitu perusahaan dengan omzet tahunan yang cukup signifikan: hingga Rp 50 miliar (USD3,2 juta).<sup>22</sup>

Indonesian sustainable finance regulation introduced in 2016 requires banks, public companies and issuers of shares and bonds to publish annual sustainability reports and produce sustainable finance action plans. Studies indicate that while there is now full *procedural* compliance with the regulation among banks, the quality of these reports are often poor and do not follow standard reporting guidelines.

OJK regulation requires banks to report their ESG financing portfolio against 12 sustainable activities (11 'green business' activities and 1 social activity: small and medium sized enterprise financing (MSME). This means that MSME financing is considered automatically sustainable, without additional environmental considerations. There is a major risk that banks may finance deforestation and other harms through their MSME clients, which includes companies with significant annual turnovers of up to IDR 50 billion (USD \$3.2 million).<sup>22</sup>



## Pengungkapan Risiko Terkait Iklim Climate Risk Disclosures

Ada peningkatan kekhawatiran bahwa bank-bank di Asia telah meremehkan risiko perubahan iklim, dan bank-bank di Indonesia semakin mendapat tekanan dari investor untuk mengungkapkan risiko iklim pada bisnis mereka. Pada bulan Desember 2023, OJK menyatakan bahwa semua bank di Indonesia perlu mempertimbangkan risiko iklim dalam keputusan pemberian pinjaman mereka pada tahun 2026.<sup>23</sup> Beberapa bank di Indonesia telah mulai menerapkan kerangka kerja risiko iklim yang dicanangkan oleh Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD). Pada tahun 2023, BRI menjadi bank Indonesia pertama yang mengungkapkan perkiraan emisi Scope 3 mereka dalam laporan TCFD-nya.<sup>24</sup> Laporan tersebut menegaskan sawit dan *pulp & paper* sebagai sektor yang merisikokan iklim. Meskipun pengungkapan ini merupakan langkah maju yang positif, kebijakan mitigasi risiko BRI tidak mengatasi penyebab utama emisinya; yaitu: deforestasi, konversi lahan gambut, serta subsidi dan kebakaran yang sedang berlangsung.

There is increasing worry that banks in Asia are underpricing climate change risks, and Indonesia's banks are under increasing pressure from investors to disclose the climate risks to their business. In December 2023, OJK announced that all Indonesian banks need to factor climate risks into their lending decisions by 2026.<sup>23</sup> Some Indonesian banks have started to implement the climate-risk framework of the Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). In 2023, BRI became the first Indonesian bank to disclose estimates for its Scope 3 financed emissions in its TCFD report.<sup>24</sup> This highlights palm oil and pulp & paper as climate-risk sectors. While these disclosures are a positive step forward, BRI's risk mitigation policies do not address the major drivers of emissions- deforestation, peatland conversion and ongoing subsidence and fire.



**Pengeringan lahan gambut untuk kelapa sawit, Rawa Gambut Tripa, Aceh.**

Draining peatlands for oil palm, Tripa Peat Swamp, Aceh.

Sumber Source: RAN



## **Pasar Karbon dan Perdagangan Karbon** **Carbon Market and Trading**

Undang-undang P2SK memperkenalkan peraturan penting mengenai pasar karbon Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2023, perdagangan kredit karbon dilakukan melalui Pertukaran Karbon Indonesia. P2SK mendefinisikan satuan karbon sebagai sekuritas dan menetapkan bahwa OJK wajib mengatur, menerbitkan

The P2SK law introduced important regulation of Indonesia's carbon market. Launched in 2023, the trading of carbon credits occurs through Indonesia's Carbon Exchange. P2SK defines carbon units as securities and stipulates that OJK must regulate, issue permits, supervise and develop Indonesia's carbon exchange.

izin, mengawasi dan mengembangkan pertukaran karbon Indonesia.

Diperkirakan, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berupaya mendaftarkan kredit karbon berdasarkan klaim penyerapan karbon pada hutan dan lahan dalam perdagangan ini. Masyarakat sipil Indonesia telah memperingatkan bahwa proyek *carbon offset* berbasis lahan dan hutan merupakan ancaman bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang hak-haknya belum diakui secara resmi oleh pemerintah, dan mungkin rentan terhadap penggusuran.<sup>25</sup>

Selain itu, pada tahun 2023 terjadi sejumlah skandal besar terkait klaim karbon pada beberapa proyek di negara-negara seperti Brasil, Zimbabwe, dan Peru.<sup>26</sup> Sebuah analisis yang kredibel menyatakan bahwa 90% kredit karbon hutan yang disertifikasi oleh Verra – lembaga sertifikasi utama – ternyata tidak ada nilainya.<sup>27</sup> Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dan anjloknya harga kredit karbon global.<sup>28</sup>

Meskipun harga mungkin akan pulih, pasar karbon Indonesia berisiko memicu gelombang konflik lahan dan pelanggaran hak lainnya. Selain risiko sosial dan tata kelola, pertanyaan mengenai integritas klaim karbon bisa mendatangkan risiko atas stabilitas keuangan yang harus dikelola oleh OJK. Berdasarkan UU P2SK, regulasi akan dikembangkan oleh ‘penyelenggara pertukaran karbon’ dan disetujui oleh OJK. Kegagalan pasar karbon sukarela baru-baru ini menunjukkan bahwa penanganan risiko-risiko ESG dalam proyek-proyek berbasis lahan yang kompleks menimbulkan tantangan yang besar dan mungkin tidak dapat diatasi; sehingga memerlukan standar yang kuat, verifikasi yang transparan, dan pemantauan yang berkelanjutan. Sejauh ini Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Derivatif Komoditi Indonesia (ICDX) sudah menyatakan niatnya menjadi penyelenggara.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia memprediksi pasar perdagangan karbon dapat menghasilkan US\$1-15 miliar per tahun.<sup>30</sup> Sejak diluncurkannya pertukaran karbon Indonesia pada bulan September 2023, sejauh ini dilaporkan aktivitas perdagangan yang terjadi masih sangat rendah.<sup>31</sup>

It is anticipated that companies in Indonesia would seek to list carbon credits based on claims of forest and land carbon sequestration on this exchange. Indonesian civil society has warned that land and forest based carbon offset projects are a threat to Indigenous and local communities whose rights haven't been officially recognized by the government, and may be prone to displacement.<sup>25</sup>

Additionally, 2023 saw a number of major scandals concerning the carbon claims of projects in countries such as Brazil, Zimbabwe and Peru.<sup>26</sup> One influential analysis alleged that 90% of rainforest carbon credits certified by Verra - the primary certification body - were worthless.<sup>27</sup> This prompted a loss of confidence and a massive slump in the global prices of such carbon credits.<sup>28</sup>

While prices may recover, Indonesia's carbon market risks driving another wave of land conflicts and rights violations. In addition to these social and governance risks, questions concerning the integrity of carbon claims constitute a risk to financial stability that must be managed by OJK. Under P2SK regulation, regulations will be developed by ‘carbon exchange organizers’ and approved by OJK. Recent failures of voluntary carbon markets suggest that addressing ESG risks within complex land-based projects poses an immense and possibly insurmountable challenge that will require robust standards, transparent verification, and continuous monitoring. So far the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX) have expressed intent to be such organizers.<sup>29</sup>

The Indonesian government predicts that the carbon trading market could generate US \$1-15 billion annually.<sup>30</sup> Since the launch of Indonesia's carbon exchange in September 2023, there has so far reportedly been very little trading activity.<sup>31</sup>





## Regulasi tentang Pemilik Manfaat/Beneficial Owner (BO) Beneficial Ownership Regulation

Kepemilikan yang rumit dan tidak jelas memberi peluang bagi pendirian badan hukum untuk menghindari pajak, korupsi, dan kegiatan terlarang lainnya. Di Indonesia, sektor-sektor yang merisikokan hutan seperti minyak sawit telah berulang kali dikaitkan dengan skema korupsi<sup>32</sup> dan penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian fiskal negara.<sup>33</sup> Indonesia memperkenalkan undang-undang pada tahun 2018 yang mewajibkan semua perusahaan untuk mendaftarkan pemilik manfaat (BO) mereka dan telah membuka akses bagi publik atas data ini pada tahun 2022.

Regulasi mengenai pemilik manfaat (BO) ini menjanjikan perubahan mendasar mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Namun, sistem yang ada saat ini belum mencakup mekanisme verifikasi terhadap data yang dilaporkan; selain itu, tidak ada penalti atas ketidakpatuhan atau kesalahan pelaporan data atas pemilik manfaat (BO) itu sendiri. Analisis terbaru mengenai kepatuhan atas regulasi BO di sektor *pulp & paper* mengungkap permasalahan pada keakuratan data yang dilaporkan ke sistem registri. Walaupun 80% perusahaan *pulp* telah menyerahkan informasi mengenai BO mereka, 20%-nya belum atau tidak dapat ditemukan dalam sistem pencarian di registri. Perusahaan-perusahaan lepas pantai juga dilaporkan sebagai BO dan bukan perorangan.

Sukanto Tanoto, pendiri dan pemimpin Grup Royal Golden Eagle, adalah investor terbesar sektor *pulp* Indonesia, namun ia tidak disebutkan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner/BO) perusahaan manapun di sektor ini.<sup>34</sup>

Opaque and obscure ownership allows legal entities to be used for tax evasion, corruption and other illicit activities. In Indonesia, forest-risk sectors such as palm oil have been repeatedly linked to corruption<sup>32</sup> and tax evasion schemes that have resulted in state fiscal losses.<sup>33</sup> Indonesia introduced a law in 2018 that requires all companies to register their beneficial owners (BO) and have provided public access to this data as of 2022.

These policies promise to bring about a fundamental shift towards greater expectations of corporate transparency and accountability. However, the current system lacks verification mechanisms for the reported data. There are also no penalties for non-compliance or mis-reporting data on BO. A recent analysis of BO compliance in the pulp & paper sector reveals issues with the accuracy of the data reported to the register. While 80% of pulp companies have submitted information of purported BOs, 20% have not or could not be found in the registry search. Offshore companies were also reported as the BOs rather than natural persons.

Sukanto Tanoto, chairman of Royal Golden Eagle Group is one of the largest investors in Indonesia's pulp sector but is not reported at the BO of any company in the sector.<sup>34</sup>

**Pabrik Toba Pulp Lestari, milik perusahaan yang dikuasai oleh Sukanto Tanoto.**

Toba Pulp Lestari mill, a company beneficially owned by Sukanto Tanoto.

Sumber Source: RAN

# Rekomendasi Utama

## Forests and Finance

### Forests and Finance Five Core Recommendations

01

#### Menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati

##### Halt and reverse biodiversity loss

Salah satu cara paling fundamental yang dapat dilakukan sektor keuangan untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati adalah dengan melarang pembiayaan bagi kegiatan dan sektor yang menyebabkan kerusakan alam. Lembaga-lembaga keuangan harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan mereka di segala sektor berakar pada konsep perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, bukannya gagasan absurd dan elastis semacam “nature positive” atau “no net loss”.

One of the most fundamental ways in which the financial sector can halt and reverse biodiversity loss is by prohibiting finance to activities and sectors that are driving nature destruction. Financial institutions must ensure that their policies across all sectors are rooted in the concept of protecting forests and biodiversity, rather than more obscure and flexible notions of “nature positive” or no “net” loss.

02

#### Menghormati dan memprioritaskan hak-hak Masyarakat Adat, perempuan, dan masyarakat lokal

##### Respect and prioritize the rights of Indigenous Peoples, women and local communities

Untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam GBF, sektor keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik mereka melindungi, memprioritaskan, dan memusatkan hak asasi manusia dari masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan ini harus menghormati hak-hak Masyarakat Adat, sebagaimana dituangkan

In order to follow a human rights-based approach as stated in the GBF, the financial sector must ensure that policies and practices protect, prioritize, and center the human rights of impacted communities. This approach must respect Indigenous rights, as outlined in international standards of Free, Prior, and Informed Consent (such as ILO Convention No. 169/176 and the

dalam standar internasional tentang Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan/FPIC (seperti Konvensi ILO No. 169/176 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), serta deklarasi internasional yang sudah lama ada serta praktik dan standar terbaik untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal secara berkelanjutan.



### **Mendorong transisi yang adil** **Foster a just transition**

Sektor keuangan harus memprioritaskan transisi yang adil dan inklusif dengan melakukan divestasi dari kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh korporasi yang bergerak pada bisnis ekstraktif, dan mengalihkan investasinya pada bisnis yang sifatnya regeneratif. Hal ini dapat tercapai dengan memastikan keterlibatan yang bermakna dan penghormatan terhadap hak-hak dan kesejahteraan masyarakat dan pekerja yang terkena dampak, mendorong kesejahteraan ekologi dan sosial untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, lembaga keuangan harus menghindari solusi yang salah seperti pendekatan keanekaragaman hayati dan penggantian kerugian karbon, ketergantungan yang berlebihan pada skema sertifikasi dan pengungkapan informasi, serta ketergantungan pada teknologi yang tidak terbukti dan tidak jelas.

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), as well as the long-standing international best practice and standards for protecting the rights of local communities on an ongoing, iterative basis.

The financial sector must prioritize a fair and inclusive transition by divesting from corporate-controlled extractive economies and investing in regenerative ones. It must ensure meaningful engagement, consultation, and respect for the rights and well-being of affected communities and workers, promoting ecological and social well-being in support of sustainable development goals. In addition, financial institutions must avoid false solutions such as biodiversity and carbon offset approaches, over-reliance on certification and disclosure schemes, and dependence on unproven, vague technologies.



### **Memastikan integritas ekosistem** **Ensure ecosystem integrity**

Sektor keuangan dapat mewajibkan proposal pembiayaan yang diajukan dan *assessment* yang dilakukan mengevaluasi dampak kumulatif pada seluruh ekosistem sebelum pembiayaan itu disetujui, dan melarang pembiayaan bagi kegiatan yang berdampak serius dan negatif terhadap integritas ekosistem.

The financial sector should require that funding proposals and assessments evaluate cumulative, ecosystem-wide impacts prior to awarding financing, and prohibit financing to activities that seriously and negatively impact ecosystem integrity.

05

## Menyelaraskan tujuan kelembagaan lintas sektor, isu, dan instrumen Align institutional objectives across sectors, issues, and instruments

Lembaga keuangan dan regulator dapat menciptakan koherensi yang kuat antara target terkait keanekaragaman hayati dan tujuan kelembagaan lainnya, seperti pendekatan dan target iklim, dan memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia masuk dalam *proses due diligence* dan pengambilan keputusan.

Financial institutions and regulators must create strong coherence between biodiversity-related targets and other institutional objectives, such as approaches and targets for climate, and ensure that human rights protection is embedded in all due diligence and decision-making processes.

### Sebuah Desa di Leuser.

Village in Leuser.

Sumber Source: RAN



# Catatan Akhir

## Endnote

<sup>1</sup> <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesian-banks-keep-top-slots-in-market-cap-ranking-on-solid-economic-recovery-76485501>

<sup>2</sup> Climate Watch Data, Indonesia, <https://bit.ly/3UqU9Xi>

<sup>3</sup> Trase, 2023, 'Deforestation surge ends decade of progress for Indonesia's pulp sector', <https://bit.ly/3UuBs5i>; national emissions data from Climate Watch Data, see footnote 1

<sup>4</sup> UNFCCC, Indonesia Enhanced NDC 2022, <https://bit.ly/486qmpY>

<sup>5</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (Agrarian Reform Consortium), 2023, <https://bit.ly/3vZM7KV>

<sup>6</sup> World Resources Institute, 2023, 'Forest Pulse: The Latest on the World's Forests', <https://bit.ly/3OuznIU>

<sup>7</sup> Analysis shows that there is 6.4 million ha of forests and peatland located inside oil palm concessions that could be legally converted but cause market risk for companies. This indicates the influence of voluntary NDPE policies in the palm oil market. See Chain Reaction Research, 2017, <https://bit.ly/493xZio>

<sup>8</sup> Trase, 2023, 'Deforestation surge ends decade of progress for Indonesia's pulp sector', <https://bit.ly/3UuBs5i>

<sup>9</sup> Jikalauhari, '2023 Final Notes', <https://bit.ly/488anYy>

<sup>10</sup> Nusantara Atlas, 2024, '2023 marks a surge in oil palm expansion in Indonesia', <https://bit.ly/3w19Jii>

<sup>11</sup> Chain Reaction Research, 'The Changing Context of Indonesian Deforestation: Explaining Declining Rates and Removing Threats', <https://bit.ly/3ukTqMI>

<sup>12</sup> See case studies published in 2023 on Fangiono family and First Resources Group, <https://bit.ly/3SLfABk> and Sukanto Tano-to and Royal Golden Eagle Group, <https://bit.ly/3umfxCA>

<sup>13</sup> Environmental Paper Network et al. 2023. Babat Kalimantan: Deforestasi di rantai pasok Royal Golden Eagle (RGE Group) dan kaitan RGE dengan pabrik pulp baru di Kalimantan Utara. Mei 2023

<sup>14</sup> US State Department, '2023 Investment Climate Statements: Indonesia', <https://bit.ly/4bosDzR>

<sup>15</sup> S&P, 2023, 'Indonesia banks may attract more foreign investment', <https://bit.ly/3w8jNpS>

<sup>16</sup> See Trading Economics historical prices of kraft pulp and palm oil, <https://tradingeconomics.com/>

<sup>17</sup> S&P, July 2023, 'Indonesia banks keep top slots in market cap', <https://bit.ly/3Uvwp4C>

<sup>18</sup> Jakarta Daily, October 2021, 'Indonesia government respond to mounting anxiety caused by Fintech debt', <https://bit.ly/3SNK-FUQ>

<sup>19</sup> Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, hierarki norma hukum diatur dalam Ketetapan MPR Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Hirarki Hukum. Hirarki dasarnya mencakup UUD 1945 ("UUD"), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ("Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat"), Undang-Undang ("Undang-undang"), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU ("Undang-Undang Pengganti Undang-Undang" atau "Undang-undang Sementara"), Peraturan Pemerintah ("Peraturan Pemerintah"), Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.<sup>[1]</sup>

In the current Indonesian law, the hierarchy of legal norms is regulated in MPR Decree of 2000 on The Source of Law and Hierarchy of Laws. The basic hierarchy includes UUD 1945 (the "Constitution"), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (the "Decree of the People's Representative Assembly"), Undang-Undang (the "Laws"), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or PERPU (the "a Law in Lieu of a Law" or an "Interim Law"), Peraturan Pemerintah (the "Government Regulation"), Keputusan Presiden ("Presidential Decree"), and Peraturan Daerah ("Regional Regulation").

<sup>20</sup> OJK, Green Taxonomy 1.0, <https://bit.ly/3HPnP99>

<sup>21</sup> See Institute for Energy Economics & Financial Analysis, 27 Feb 2027, <http://tinyurl.com/hvy6b2da>; TUK Indonesia, February 2023, <http://tinyurl.com/mr9tvck9>

<sup>22</sup> TUK-Indonesia, Feb 2023, Sustainable Finance Review, <https://bit.ly/3HRn67r>

<sup>23</sup> The Banker, Jan 2024, 'Indonesian banks under increasing regulatory pressure to disclose climate risks', <https://bit.ly/42x-p06O>

<sup>24</sup> Bank Rakyat Indonesia, TCFD Report 2023, <https://bit.ly/42s8Tay>

<sup>25</sup> Mongabay, Oct 2023, Indonesia opens carbon market, <https://bit.ly/3uuD9or>

<sup>26</sup> See reporting Guardian, 18 Jan 23, <https://bit.ly/3OApWS6>; Financial Times, 10 Oct 2023, 'Scandal bares the problems of Amazon carbon credits' <https://bit.ly/3UtgexE>

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> S&P, 05 Jan 24, 'Commodities 2024: Price Slump in 2023 clouds outlook for voluntary carbon market', <https://bit.ly/3SOv6MT>

<sup>29</sup> Indonesia Business Post 24 Aug 2023, <https://bit.ly/4buKp4G>

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Climate Home News, 20 Nov 2023, 'Slow start for Indonesia's much-hyped carbon market'

<sup>32</sup> Mongabay, 20 June 2023, 'Palm oil giants face corruption charges as Indonesia probe widens', <http://tinyurl.com/ytt5mdu8> ; Al Jazeera, 24 Feb 2023, 'Indonesia's palm oil tycoon gets 15 years for corruption', <http://tinyurl.com/52e2zsmz>

<sup>33</sup> See The Prakarsa, 2019, <http://tinyurl.com/fpp9853k> and 2023, <http://tinyurl.com/3krzypcv>

<sup>34</sup> Woods & Wayside et al, 2023, <http://tinyurl.com/mrxwu5yy>



**Tahun Penerbitan**

Maret, 2024

**Publication Date**

March, 2024